

MANAJEMEN MUTU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN: STUDI PUSTAKA

Rosih

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia
rosihsaepudin@gmail.com,

Asep Muztaba

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia
muztabaasep@gmail.com

Lukman Nugraha

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia
lukmannugraha@stai-mifda.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan melalui metode *library research* untuk memetakan hubungan antara kerangka kebijakan nasional–Islam dengan praktik peningkatan mutu di sekolah dan madrasah. Data dikumpulkan dari artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait manajemen mutu, perencanaan pendidikan, pembiayaan, dan kepemimpinan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan pendidikan yang terintegrasi dengan manajemen pembiayaan, penguatan budaya mutu, partisipasi pemangku kepentingan, dan model *Total Quality Management* (TQM) yang kontekstual di madrasah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar, kepuasan masyarakat, serta daya saing lembaga. Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi sinergi antara kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, manajemen pembiayaan dan fasilitas, kepemimpinan mutu, serta manajemen pembelajaran yang terencana dan terukur. Keterbatasan sumber daya, kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lemah masih menjadi tantangan implementasi kebijakan mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kuat antara kebijakan pendidikan, manajemen mutu yang profesional, dan kepemimpinan transformasional merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: manajemen mutu pendidikan, kebijakan pendidikan, penjaminan mutu, studi pustaka.

Abstract: This study discusses quality management in education policy through library research to map the relationship between the national-Islamic policy framework and quality improvement practices in schools and madrasas. Data were collected from journal articles, research reports, and policy documents related to quality management, educational planning, financing, and educational leadership.

This study found that educational planning integrated with financing management, strengthening a culture of quality, stakeholder participation, and contextual of Total Quality Management (TQM) models in madrasahs contribute significantly to improving learning achievement, community satisfaction, and institutional competitiveness. The results of the study show that the quality of education is greatly influenced by the synergy between decentralization policies, school-based management, financing and facility management, quality leadership, and planned and measurable learning management. Limited resources, uneven human resource competencies, and weak utilization of information technology remain challenges in the implementation of quality policies. This study concludes that strong integration between education policy, professional quality management, and transformational leadership is the key to realizing an adaptive, accountable, and sustainable education system.

Keywords: *educational quality management, educational policy, quality assurance, literature review.*

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan masih menjadi persoalan utama di Indonesia meskipun berbagai kebijakan reformasi dan standarisasi telah diterapkan secara nasional (Sunoto dkk., 2023). Kualitas pendidikan yang rendah tercermin dari capaian hasil belajar, relevansi lulusan, serta kesenjangan mutu antar lembaga sehingga menghambat daya saing bangsa di era global (Azhari & Kurniady, 2016; Harbes dkk., 2024). Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah mengembangkan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, dan sistem penjaminan mutu untuk mendorong lembaga pendidikan mengelola mutu secara lebih mandiri, akuntabel, dan partisipatif (Achmad & Hartono, 2021; Deraman dkk., 2022).

Beragam kajian menunjukkan bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh pengelolaan input, proses, dan output secara terintegrasi—meliputi manajemen pembiayaan, fasilitas pembelajaran, kepemimpinan, perencanaan strategik, serta budaya mutu (Azhari & Kurniady, 2016; Abin, 2017; Maulidin & Lukitasari, 2024). Pendekatan *Total Quality Management* (TQM) dan sistem penjaminan mutu nasional menuntut sekolah dan madrasah menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik manajerial yang konkret, seperti perencanaan berbasis kebutuhan, pengawasan berkelanjutan, serta fokus pada kepuasan pemangku kepentingan (Sunoto dkk., 2023; Deraman dkk., 2022; Apiyani, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara kebijakan mutu yang tertulis dengan implementasi di satuan pendidikan, terutama dalam konteks lembaga pendidikan Islam dan sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan perubahan lingkungan eksternal yang cepat (Deraman dkk., 2022; Harbes dkk., 2024; Abrar dkk., 2024). Kajian pustaka memungkinkan pemetaan komprehensif mengenai bagaimana manajemen mutu dioperasionalkan melalui kebijakan, termasuk perencanaan dan pembiayaan, kepemimpinan mutu, strategi kerjasama, serta pengembangan model manajemen mutu berbasis TQM di madrasah (Achmad & Hartono, 2021; Cahyono dkk., 2023; Apiyani, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) konsep manajemen mutu pendidikan dalam bingkai kebijakan pendidikan nasional dan Islam; (2) peran kebijakan desentralisasi, pembiayaan, dan sistem penjaminan mutu dalam peningkatan kualitas

pendidikan; dan (3) praktik serta tantangan implementasi manajemen mutu di sekolah dan madrasah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberi landasan teoretis sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan (Sunoto dkk., 2023; Achmad & Hartono, 2021; Harbes dkk., 2024). Berikut adalah tabel yang menunjukkan fokus kajian pada penelitian ini:

Tabel A.1 Ringkasan Fokus Kajian

Fokus kajian	Uraian singkat
Konsep dan kerangka mutu	Mutu, TQM, input–proses–output dalam pendidikan
Kebijakan dan pembiayaan	Desentralisasi, MBS, perencanaan dan manajemen biaya
Implementasi dan tantangan	Praktik mutu di sekolah/madrasah dan respons lembaga Islam

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka, yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk dianalisis secara sistematis (Apiyani, 2025). Studi pustaka melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dibaca secara komprehensif dan dicatat secara akurat untuk diolah menjadi landasan teori dan temuan konseptual (Ahyar dkk., 2025; Sari & Asmendri, 2020, dalam Ahyar dkk., 2025).

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktik manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan, bukan pada pengukuran numerik (Apiyani, 2025). Sumber data dipilih berdasarkan kriteria keterkinian (sekitar 10 tahun terakhir), relevansi dengan tema manajemen mutu dan kebijakan pendidikan, serta kredibilitas akademik, termasuk jurnal terindeks dan kajian kebijakan resmi (Apiyani, 2025; Abrar dkk., 2024).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep kunci, hubungan teoretis, dan pola temuan empiris terkait manajemen mutu, kepemimpinan, pembiayaan, dan kebijakan pendidikan (Apiyani, 2025; Abrar dkk., 2024). Literatur dikategorikan ke dalam tema: konsep dan strategi manajemen mutu, kebijakan pendidikan dan penjaminan mutu, praktik implementasi di sekolah/madrasah, dan tantangan serta prospek perbaikan kebijakan. Sintesis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan pemahaman komprehensif mengenai manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan (Achmad & Hartono, 2021; Sunoto dkk., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang ditelaah pada penelitian ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel C.1 Artikel yang Ditelaah

No	Penulis & Tahun	Fokus Utama	Metode	Temuan Kunci
1	Sunoto dkk., 2023	Manajemen mutu pendidikan dalam kebijakan nasional dan Islam	Studi pustaka	Mutu ditingkatkan melalui TQM, penjaminan mutu, dan sinergi kebijakan nasional–Islamik
2	Achmad & Hartono, 2021	Desentralisasi dan kepemimpinan dalam meningkatkan mutu lembaga	Studi pustaka kualitatif	Desentralisasi dan otonomi memberi ruang MBS; kepemimpinan menentukan mutu lembaga
3	Azhari & Kurniady, 2016	Manajemen pembiayaan, fasilitas, dan mutu sekolah	Deskriptif kuantitatif	Pembiayaan dan fasilitas berpengaruh kuat dan signifikan terhadap mutu sekolah
4	Deraman dkk., 2022	Respons lembaga Islam terhadap sistem manajemen mutu nasional	Kualitatif deskriptif	Lembaga Islam mengimplementasikan fungsi manajemen sesuai manual mutu nasional
5	Harbes dkk., 2024	Perencanaan pendidikan dan manajemen pembiayaan	Kajian literatur dan studi kasus	Integrasi perencanaan–pembiayaan kunci peningkatan mutu dan berkelanjutan dan akuntabilitas
6	Maulidin & Lukitasari, 2024	Manajemen mutu pendidikan dan prestasi sekolah	Kualitatif studi kasus	Manajemen mutu meningkatkan prestasi siswa, kepuasan masyarakat, dan sistem berbasis karakter
7	Mukarromah dkk., 2021	Manajemen pembelajaran di madrasah	Studi pustaka kualitatif	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kurikulum & fasilitas menentukan mutu output madrasah
8	Apiyani, 2025	Model manajemen mutu madrasah berbasis TQM	Studi pustaka kualitatif	Kepemimpinan transformasional, partisipasi stakeholder, CIPP, model TQM
9	Abrar dkk., 2024	Evaluasi sistem manajemen pendidikan Islam	<i>Systematic literature review</i>	Manajemen mutu, keuangan, pengembangan pendidik, dan teknologi informatika menjadi faktor

				kunci efektivitas kebijakan
10	Cahyono dkk., 2023	Manajemen strategi kerjasama & mutu	Kualitatif	Strategi kerjasama mendukung visi, misi, dan program peningkatan mutu sekolah

Berdasarkan tabel C.1, penulis akan memberikan beberapa poin bahasan yaitu: a) konsep manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan, b) Kebijakan pendidikan, desentralisasi, dan pembiayaan, c) Implementasi manajemen mutu di sekolah dan madrasah, serta d) Tantangan dan Prospek. Berikut pembahasannya:

Konsep Manajemen Mutu dalam Kebijakan Pendidikan

Manajemen mutu pendidikan dipahami sebagai pengelolaan terpadu seluruh komponen pendidikan agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pemangku kepentingan melalui pendekatan sistemik berbasis TQM (Total Quality Management) (Sunoto dkk., 2023). Pada pendekatan berbasis TQM pendidikan, mutu dicapai dengan fokus pada pelanggan dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dan masyarakat. Hal itu terlihat dari bentuk keterlibatan total warga sekolah, standar mutu lulusan yang jelas, komitmen pimpinan, dan perbaikan berkelanjutan (Sunoto dkk., 2023; Sallis, 2012, dalam Azhari & Kurniady, 2016).

Strategi mutu menekankan pengelolaan input-proses-output. Input mencakup sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, staf), sarana-prasarana, dana, serta regulasi dan visi-misi; kesiapan input yang tinggi menjadi prasyarat proses yang bermutu (Sunoto dkk., 2023; Azhari & Kurniady, 2016). Proses menyangkut manajemen pembelajaran, kurikulum, dan iklim organisasi yang kondusif, sementara output bermutu tercermin dari prestasi akademik dan nonakademik, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan *stakeholder* (Mukarromah dkk., 2021; Maulidin & Lukitasari, 2024).

Kebijakan Pendidikan, Desentralisasi, dan Pembiayaan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan di Indonesia memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikan, yang dioperasionalkan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Achmad & Hartono, 2021). Kebijakan ini menuntut kepala sekolah/kepala madrasah menjadi pemimpin mutu yang mampu memanfaatkan sumber daya dan menyusun program sesuai konteks lokal (Achmad & Hartono, 2021; Abin, 2017).

Manajemen pembiayaan dan fasilitas pembelajaran terbukti berpengaruh kuat dan signifikan terhadap mutu sekolah, sehingga perencanaan dan pengawasan pembiayaan yang baik merupakan bagian penting dari kebijakan mutu (Azhari & Kurniady, 2016). Integrasi perencanaan pendidikan berbasis kebutuhan siswa, perkembangan teknologi, dan tuntutan pasar kerja dengan manajemen pembiayaan yang transparan dan kolaboratif (publik, swasta, industri) mampu meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan memperkuat akuntabilitas (Harbes dkk., 2024).

Dalam perspektif pendidikan Islam, kebijakan penjaminan mutu nasional direspons lembaga pendidikan Islam dengan mengimplementasikan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) sesuai

manual mutu, menunjukkan keterhubungan erat antara kebijakan negara dan manajemen mutu di level lembaga (Deraman dkk., 2022). Evaluasi sistematis menunjukkan bahwa manajemen mutu, pengelolaan keuangan, dan pengembangan pendidik merupakan faktor kunci efektivitas kebijakan pendidikan Islam (Abrar dkk., 2024).

Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah dan Madrasah

Pada tataran operasional, manajemen mutu diwujudkan melalui perencanaan strategik, pelaksanaan program, dan evaluasi berkelanjutan yang berorientasi mutu. Studi di MTs Bustanul Ulum Jayasakti menunjukkan bahwa manajemen mutu melalui seleksi peserta didik, penerapan Kurikulum Merdeka, dan pengembangan karakter-kompetensi berdampak signifikan pada peningkatan prestasi siswa dan kepuasan masyarakat (Maulidin & Lukitasari, 2024).

Di madrasah, manajemen pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembenahan kurikulum, dan penyediaan fasilitas memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten (Mukarromah dkk., 2021). Pengembangan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kekhasan lokal dan kebutuhan lingkungan, serta pengelolaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara efektif, mendukung terbentuknya output bermutu (Mukarromah dkk., 2021).

Pengembangan model manajemen mutu berbasis *Total Quality Management* (TQM) di madrasah menekankan kepemimpinan transformasional kepala madrasah, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, penggunaan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP), dan internalisasi nilai-nilai Islam sebagai fondasi budaya mutu (Apiyani, 2025). Implementasi sistem manajemen mutu pendidikan nasional di SMP IT Masjid Syuhada, misalnya, telah memenuhi sebagian besar manual mutu, menunjukkan kesiapan lembaga Islam merespons kebijakan penjaminan mutu (Deraman dkk., 2022).

Selain itu, manajemen strategi kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal mendukung pengembangan visi, misi, dan program peningkatan mutu jangka panjang maupun tahunan, sehingga memperkuat basis kebijakan mutu di tingkat satuan pendidikan (Cahyono dkk., 2023).

Tantangan dan Prospek

Berdasarkan pada studi pustaka ini menunjukkan bahwa tantangan utama manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan mencakup keterbatasan sumber daya, kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, dan lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya komitmen pimpinan terhadap budaya mutu (Achmad & Hartono, 2021; Azhari & Kurniady, 2016; Abrar dkk., 2024). Inisiatif pada manajemen mutu sering gagal karena kurangnya dukungan manajerial tingkat atas dan ketiadaan perencanaan strategis yang konsisten (Achmad & Hartono, 2021).

Pada sisi prospek, peningkatan manajemen mutu pendidikan dapat melalui penguatan kepemimpinan, integrasi perencanaan dan pembiayaan, pengembangan model TQM yang kontekstual di madrasah, serta peningkatan profesionalisme guru dan kolaborasi berbagai pihak (Harbes dkk., 2024; Apiyani, 2025; Deraman dkk., 2022). Kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global dan perkembangan

teknologi, jika diiringi manajemen mutu yang profesional, berpotensi membangun sistem pendidikan yang responsif dan berkelanjutan (Abrar dkk., 2024; Sunoto dkk., 2023).

D. KESIMPULAN

Manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan merupakan kerangka sistemik yang menghubungkan regulasi nasional dan tuntutan masyarakat dengan praktik pengelolaan di sekolah dan madrasah. Konsep mutu yang diwujudkan melalui TQM menuntut pengelolaan terpadu terhadap input, proses, dan output, dengan fokus pada kepuasan pemangku kepentingan/kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. Kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, dan sistem penjaminan mutu nasional memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan strategi mutu sesuai konteks, sementara manajemen pembiayaan dan perencanaan pendidikan menjadi fondasi keberlanjutan mutu.

Hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen mutu pendidikan berdampak nyata pada peningkatan prestasi siswa, kepuasan masyarakat, dan daya saing lembaga, terutama ketika didukung kepemimpinan transformasional, manajemen pembelajaran yang baik, dan partisipasi pemangku kepentingan/kebijakan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan lemahnya komitmen mutu masih mengemuka, namun dapat diatasi melalui penguatan kapasitas manajerial, pengembangan model mutu berbasis nilai dan konteks lokal, serta kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa integrasi yang kuat antara kebijakan pendidikan dan manajemen mutu pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Indonesia.

REFERENSI

- Abin, M. R. (2017). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 87-102. <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.87-102>
- Abrar, K., Sabri, A., & R. (2024). Evaluasi Sistem Manajemen Pendidikan Islam: Analisis Literatur Sistematis untuk Perbaikan Kebijakan. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1232>
- Achmad, H., & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.521>
- Ahyar, Ahyar & Fadillah, Amanah & Juwita, Fannia. (2025). Peran Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini : Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*. 4. 388-399. DOI:[10.55606/jurripen.v4i2.5668](https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5668)
- Apiyani, A., Brigjend, J., No, S., & Metro, K. (2025). Pengembangan Model Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah: Studi Teoritis dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1121>

- Azhari, U., & Kurniady, D. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Cahyono, I., Syaifudin, M., & Andriani, T. (2023). Manajemen Strategi Kerjasama dalam Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1482>
- Deraman, D., Pabbajah, M., & Widyanti, R. (2022). Respons lembaga pendidikan islam atas implementasi sistem manajemen mutu pendidikan nasional. *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3051>
- Harbes, B., Karim, H., Sesmiarni, Z., Armedo, M., & Salsabila, S. (2024). Perencanaan Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan (Mewujudkan Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan). *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.8860>
- Maulidin, S., & Lukitasari, D. (2024). Manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan prestasi sekolah. *ACTION : Jurnal Inovasi Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah*. <https://doi.org/10.51878/action.v4i3.4268>
- Mukarromah, S., Rosyidah, A., & Musthofiyah, D. (2021). Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13889>
- Sunoto, S., Rosyid, M., & Yulianto, D. (2023). Manajemen mutu pendidikan dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional dan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 4(2), 25–42. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i1.992>